

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alam setia zein. 2003. *Kamus Kehutanan*. Jakarta. PT. Renika Cipta.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Bambang Pamulardi. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Wawulyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hambali Thalib. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*. Umithoa Ukhuwah Grafika. Makassar.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *penelitian hukum*. Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (*Edisi Revisi*). Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya. Putra Harsa.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Risa Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging*, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global, Tangerang, Wana Aksara, Tangerang.
- Shanty Dellyna. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. UI Press. hlm. 35.
- Shanty Dellyna. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta. PT Sinar Grafika.
- Suriansyah Murhaini. 2011. *Hukum Kehutanan*. Yogyakarta. Laksbang
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. PT. Rajawali Pers. Grafika.

- Vika Azkiya Dihni. 2020. *10 Negara dengan Area Hutan Lindung Terluas*.(2020).
- R. Soesilo, 1988, *KUHP serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi, Pasal Poelita*, Bogor.
- RM. Gatot Soemartono, 1991, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Soejono dirdjosisworo, 1983, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung: Alumni,
- Mochtar kusumaatmaja, 2002, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni,
- Riki, *Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan di Kawasan Pertambangan Morowali ditinjau dari Hukum Lingkungan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013,
- Suparto Wijoyo, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),
- Maradona, 2018, "Penegakan Hukum Lingkungan: Administrasi dan Pidana". Dalam Laode M. Syarif & Andri W. Wibisana (Eds.), *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta: USAID & The Asia Foundation,

#### **Jurnal:**

- Adi Wijaya, "*Forest Fire and Environmental Damage: The indonesia Legal Policy and Law Enforcement*", vol. 8 no. 1, 2022.
- Gunggung Senoaji. 2009. "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu". Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 13 No. 1.
- Laurensius Arliman S, "*Eksistensi Hukum Lingkungan dalam membangun Lingkungan sehat di indonesia*", vol. 8, no. 116, 2018.

Maskun, Aspek Hukum dan Ham pada penggunaan kawasan Hutan bagi kepentingan pembangunan strategis: menyoal Pemilihan dan jaminan ketidakberulangan, Media iuris, Vol 5, No 2, Juni 2022.

Michael T Coe, *Deforestation and climate feedbacks threaten the ecological integrity of south southeastern Amazonia*, volume 368, edisi 1619, 2013

Sri Rahayu Muh. Saleh. Abrar Saleng.dan Kahar Lahae. 2022. "Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Lokal, dan Masyarakat dari Luar Kawasan." Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. *Batulis Civil Law Review*. Vol. 3 No.2.

Zulkifli Aspan." Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup). *Jurnal amanna Gappa*. vol. 25 No.2, September 2017.

Zulkifli Aspan Konstitusionalisasi tanggung jawab negara terhadap pelestarian lingkungan hidup, *Amanna Gappa*, Vol. 30 No. 2, 2022

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

### **Tesis Dan Disertasi**

A Miftahuddin A. Hasyim. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu

Timur”. Tesis. Fakultas Hukum Universita Islam Alauddin Makassar.

Zulkifli Aspan Konstitualisasi Hak atas Lingkungan dalam perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga

**Website:**

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/584/jbptunikompp-gdl-mochaditia-29192-9-unikom\\_m-i.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/584/jbptunikompp-gdl-mochaditia-29192-9-unikom_m-i.pdf), diakses pada tanggal 09 Desember 2022.

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kulisah-hukum/hukum-pidana/>, diakses pada hari tanggal 1 Desember 2022.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan\\_lindung](https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_lindung), diakses pada tanggal 29 November 2022.

<https://jurnalbumi.com/hutan-lindung/#return-note-68-1>, diakses pada tanggal 06 Desember 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/13/indonesia-miliki-kawasan-hutan-lindung-terluas-ke-2-di-dunia>, diakses pada 20 desember 2022.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan\\_lindung](https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_lindung).

<https://jurnalbumi.com/hutan-lindung/#return-note-68-1>.

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/584/jbptunikompp-gdl-mochaditia-29192-9-unikom\\_m-i.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/584/jbptunikompp-gdl-mochaditia-29192-9-unikom_m-i.pdf).

<https://repository.uai.ac.id/wp-content/aplods/2019/04/b23-prosiding-Nasional-penyelesaian-konflik-kebijakan-pengelolaan-sumber-daya>

## LAMPIRAN

### 1. Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian di KPH Kalaena

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KALAENA**  
Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Bungapati Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara-KP 92967 E-mail : kphkalaena\_sulsel@yahoo.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 522 / 36 / KPH – KLN


Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : **JUNITA SRI LIBERTIN, S.Hut**  
Nip : 19790602 200502 2 003  
Jabatan : Kepala UPT. KPH. KALAENA

Menerangkan bahwa :

Nama : **ALGASALI HARRIS**  
Nomor Pokok : B012212045  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum ( S. 2 )  
Judul Proposal : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung

Benar telah melaksanakan Penelitian di Wilayah kerja UPT. KPH Kalaena Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur selama Dua ( 2 ) Hari mulai tanggal 27 – 28 Maret 2023. Demikian surat Keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya

Tana Lili, 29 Maret 2023  
Kepala UPT. KPH Kalaena  
  
**JUNITA SRI LIBERTIN, S.Hut**  
Pangkat : Penata Tkt. I  
NIP. 19790602 200502 2 003

## 2. Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Malili



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN  
KEJAKSAAN NEGERI LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah Malili, Kabupaten Luwu Timur

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 574 /P.4.36.3/Es/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S a h w a l  
NIP : 198409082002121003  
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Luwu Timur

Menerangkan bahwa :

Nama : ALGASALI HARRIS  
Nomor Pokok : B012212045  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (S.2)  
Judul Proposal : Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung

Benar telah melaksanakan Wawancara dalam rangka melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur selama 1 (satu) hari tanggal 31 Maret 2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 31 Maret 2023  
An. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur  
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum



**SAHWAL  
JAKSA MUDA**

Tembusan:

1. Arsip.



Peraturan di atas ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN



3. Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Malili



**PENGADILAN NEGERI MALILI KELAS II**  
Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur  
Telp. 0474-321483; 3220342 Kode Pos 92981,  
Email: pengadilanmalili@gmail.com; Website: pn-malili.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : W22-U22/322/HK.00/IV/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.**  
Nip. : 19780116 200212 1 004  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Malili;

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **ALGAZALI HARRIS**  
Nim : B012212045  
Fak/ Prog.Studi : Magister Ilmu Hukum (S.2)  
Judul Proposal : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Ekosistem  
Kawasan Hutan Lindung


Benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Malili Kelas II pada tanggal **27 Maret s.d 3 April 2023**, Surat keterangan penelitian ini digunakan seperlunya dalam rangka penyelesaian penelitian/study yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malili, 3 April 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI MALILI** ✍  
  
**HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.**  
NIP. 19780116 200212 1 004

4. Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian di Desa Kasintuwu

  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN MANGKUTANA**  
**DESA KASINTUWU**  
*Jl. Trans Sulawesi No. Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana. Kode Pos 92973*

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 520/226/DKS-KM**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EMI PANGINJA**  
Jabatan : Sekretaris Desa

Menerangkan bahwa:


Nama : ALGAZALI HARRIS  
Nomor Pokok : B012212045  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (S2)  
Judul Proposal : Penengakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung

Benar akan melakukan Penelitian di Desa Kasintuwu Selama 1 yaitu tanggal 28 Maret 2023.  
Demikian Surat Keterangan ini dibuat berdasarkan keadaan sampai hari ini, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasintuwu, 28 Maret 2023  
a.n. Kepala Desa Kasintuwu  
Sekretaris  
  
**EMI PANGINJA**



5. Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian di Dinas Kehutanan Provinsi

  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS KEHUTANAN**  
Jln. Bajiminas No. 14 Telp. (0411) 873181 – 854638 Fax (0411) 873182 Email: [dishutsulsel@yahoo.co.id](mailto:dishutsulsel@yahoo.co.id)  
MAKASSAR 90126

---

Makassar, 14 April 2023



Kepada

Nomor	: 423-4/759.1/DISHUT	Yth.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Selatan
Sifat	:		
Lampiran	:		
Perihal	: Izin Pengambilan Data	di-	Makassar

Menindak lanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 15001/S.02/PTSP/2023 tanggal 09 April 2023 perihal: Izin Pengambilan Data dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami bersedia mengakomodir mahasiswa untuk melaksanakan pengambilan data pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan. Mulai tanggal 10 April S/D 10 Mei 2023 sebagai berikut :

Nama	: ALGAZALI HARRIS
Nomor Pokok	: B012212045
Program Studi	: Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S2)
Alamat	: Jl. P.Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Judul Penelitian	: Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Ekosistem Kawasan Hutan Lindung

Demikian di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimah kasih.

  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN,**  
  
**Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, C.E.S**  
Pangkat: Pembina Utama Madya  
NIP. 196505311991111001

6. Foto Wawancara dengan Bapak Kaiser selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Kalaena Kabupaten Luwu Timur, 28 Maret 2023 di Kantor KPH Kalaena



7. Foto Wawancara dengan ibu Jumhari selaku Kepala Uptd Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 08 Mei 2023 Di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi



8. Foto Wawancara dengan Mappeasse, Polisi Kehutanan KPH Kalaena Kabupaten Luwu Timur Wawancara Di Kawasan Hutan Lindung, 27 Maret 2023



9. Wawancara dengan Sahwal, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Luwu Timur Wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Malili, Senin 31 Maret 2023



10. Wawancara dengan Sekertaris Desa Kasintuwu, wawancara di kantor Desa Kasintuwu 28 maret 2023



11. Wawancara dengan Panmud Hukum Pengadilan Negeri Malili, wawancara di kantor Pengadilan Negeri Malili, Senin 31 Maret 2023

